



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI

(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES (PERSERO), PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DAN DJSN)

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Direktur Utama RS. Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi.  
Sifat : **Terbuka**  
Hari, tanggal : Kamis, 22 April 2010  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I  
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta  
Acara : Membicarakan mengenai pengembangan Rumah Sakit Stroke Bukittinggi.  
Jumlah kehadiran : Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama RS. Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, dibuka pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1), dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Utama RS. Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi menyampaikan paparan sebagai berikut:
  - a. RSSN Bukittinggi yang sebelumnya bernama RSUP Bukittinggi berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan No: 495/Menkes/IV/SK/2005 tanggal 13 April 2005 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN). Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi merupakan Rumah Sakit Stroke pertama dan satu-satunya di Indonesia.
  - b. Angka kematian tertinggi stroke adalah Sumatera Barat dan 70 % pasien stroke menderita depresi, sehingga jumlah pasien stroke semakin meningkat. Untuk itu perlu pengembangan

agar lebih representatif dengan fasilitas wisata kesehatan, pengembangan rumah sakit itu juga dimaksudkan agar masyarakat yang menderita stroke tidak berobat ke rumah sakit di Malaysia dan Singapura. Untuk melaksanakan program tersebut RSSN Bukittinggi butuh tambahan luas tanah seluas 3 atau 4 hektar lagi, sedangkan luas lahan RSSN Bukittinggi saat ini hanya 1,3 Hektar. Tambahan luas tanah untuk pengembangan rumah sakit diberikan melalui upaya pengalihan asset tanah milik Pangdam Bukit Barisan TNI AD kepada RSSN Bukittinggi.

- c. Alih status tanah seluas 3 hektar dari TNI AD kepada RSSN Bukittinggi diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp. 18 Milyar. Kendala yang dihadapi oleh RSSN Bukittinggi dalam masalah tersebut yaitu anggaran perluasan lahan mempergunakan anggaran sendiri dan tidak dianggarkan dalam APBN.
  - d. RSSN Bukittinggi mengharapkan dukungan anggaran pengembangan rumah sakit, secara keseluruhan sebesar Rp. 313 Milyar, diharapkan agar dapat dianggarkan melalui APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kota Bukittinggi.
2. Dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi menuju rumah sakit stroke yang bertaraf internasional tentunya akan membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, mengingat banyaknya jumlah pasien perempuan yang berobat ke RSSN, maka diperlukan tambahan tenaga medis perempuan.
  3. Mengharapkan agar RSSN Bukittinggi memperhatikan dan mencari solusi terhadap pasien yang tidak tertampung di RSSN Bukittinggi, dan jangan sampai terjadi penolakan pasien oleh karena tidak adanya tempat tidur atau karena kurangnya peralatan kesehatan.
  4. Agar pihak pemerintahan daerah kota Bukittinggi dan RSSN meningkatkan promosi kesehatan sehingga jumlah masyarakat yang menderita stroke di Bukittinggi dan sekitarnya tidak bertambah.
  5. Perlu dukungan sarana dan prasarana secara lintas sektoral, termasuk bantuan financial dari pemerintah daerah, agar rencana RSSN Bukittinggi yang akan mengembangkan fasilitas Wisata Kesehatan berhasil.
  6. Peningkatan pendapatan RSSN Bukittinggi agar diikuti pula oleh peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu/pasien kelas III serta pemakai kartu Jamkesmas. Upaya untuk menjadikan RSSN menjadi rumah sakit rujukan stroke nasional dan pusat penelitian agar segera dibicarakan dengan Kemenkes, termasuk penyiapan SDM dan tenaga kesehatan yang handal.
  7. Dalam rangka penyelesaian alih status tanah dari TNI AD kepada RSSN Bukittinggi, diusulkan agar dilaksanakan melalui MoU pengalihan asset sesama pemerintah, yaitu antara Panglima TNI dan Menteri Kesehatan RI.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI mendukung pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi menjadi Rumah Sakit Khusus Stroke dan Rumah Sakit Rujukan berstandar nasional menuju standar internasional.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada pihak RSSN Bukittinggi, Pemprov Sumatera Barat, Pemda Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk segera menyelesaikan segala persoalan terkait alih fungsi tanah atau hal lain serta segala persyaratan teknis lainnya di tahun 2010.
3. Komisi IX DPR RI akan membicarakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan RSSN Bukittinggi dengan Menteri Kesehatan RI pada Rapat Kerja (Raker).
4. Komisi IX DPR RI meminta RSSN Bukittinggi untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien Kelas III dengan penambahan jumlah tempat tidur di kelas III dengan persentase 60% dari total tempat tidur.

Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Waki Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An 2